



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI
KE KABUPATEN TABANAN PADA RESES MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2023-2024
TANGGAL 9 – 13 MEI 2024**

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR RI selalu memantau dan mengawasi berbagai kebijakan dan program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf f Peraturan Tata Tertib DPR RI menyatakan bahwa salah satu kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR RI adalah melalui kunjungan kerja. Sedangkan di dalam Pasal 60 ayat (3) huruf f juga menyebutkan bahwa Komisi dapat mengadakan kunjungan kerja di masa reses yang hasilnya akan dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti. Untuk itu, Komisi IX DPR RI dalam Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja secara paralel ke 3 (tiga) daerah di Provinsi Bali, yaitu Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar.

Dalam pelaksanaan kunjungan kerja, Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan serta pengawasan obat dan makanan, mengharapkan mendapatkan masukan secara langsung baik dari pemerintah daerah, mitra kerja, maupun masyarakat umum tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat/APBN dan juga untuk memonitor pelaksanaan program-program instansi/badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di daerah tujuan kunjungan kerja. Selain itu, kunjungan kerja juga bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI.

I.2 Dasar Kegiatan

- a. Keputusan Pimpinan DPR RI tentang Penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI untuk melakukan kunjungan kerja berkelompok dalam Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024.
- b. Keputusan Rapat Internal Komisi IX DPR RI tanggal 5 Maret 2024 pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023 - 2024.

I.3 Maksud dan Tujuan

- a. Menjalankan fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugas Komisi IX DPR RI.
- b. Mendapatkan informasi realisasi program dan anggaran yang dibiayai APBN.
- c. Memetakan permasalahan masyarakat, dan memonitor pelaksanaan program-program instansi/badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di Kabupaten Tabanan.
- d. Menyerap aspirasi masyarakat Kabupaten Tabanan secara umum terkait proses legislasi, dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI.

I.4 Peserta

Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Tabanan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ibu **Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A.** Adapun susunan lengkap anggota rombongan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI sebagaimana berikut:

NO	NO. ANGG	N A M A	JABATAN	FRAKSI	DAPIIL
1.	A-35	Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, MA	KETUA TIM/ WK. KETUA KOMISI IX	PKB	JATIM III
2.	A-153	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A.	ANGGOTA	PDIP	LAMPUNG II
3.	A-190	RAHMAD HANDOYO, S.PI., M.M.	ANGGOTA	PDIP	JATENG V
4.	A-200	Dr. DEWI ARYANI, M.Si.	ANGGOTA	PDIP	JATENG IX
5.	A-276	Dr. Hj. SANIATUL LATIVA, S.E., M.M.	ANGGOTA	GOLKAR	JAMBI
6.	A-67	ADE REZKI PRATAMA, S.E., M.M.	ANGGOTA	GERINDRA	SUMBAR II
7.	A-70	Dr. Ir. H.A.R. SUTAN ADIL HENDRA, M.M.	ANGGOTA	GERINDRA	JAMBI
8.	A-90	Dr. Ir. H. KARDAYA WARNIKA, D.E.A.	ANGGOTA	GERINDRA	JABAR VIII
9.	A-380	NURHADI, S.Pd.	ANGGOTA	NASDEM	JATIM VI
10.	A-397	Hj. SITTI MARYAM, S.Sos., M.Si.	ANGGOTA	NASDEM	SULSEL II
11.	A-30	H. SUKAMTO, S.H.	ANGGOTA	PKB	D.I.Y
12.	A-569	HASAN SALEH	ANGGOTA	DEMOKRAT	KALTARA
13.	A-436	Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si.	ANGGOTA	PKS	JABAR VIII
14.	A-510	H. MUHAMMAD RIZAL, S.H., M.Si.	ANGGOTA	PAN	BANTEN III

I.5 Kegiatan Kunjungan Kerja

Dalam kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Tabanan, akan dilakukan peninjauan ke RSUD Kabupaten Tabanan, dan BLK di Kabupaten Tabanan dengan mitra kerja Komisi IX dan instansi terkait bidang kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, pengawasan obat dan makanan, dan jaminan sosial yaitu:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabanan;
3. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali;
4. Perwakilan Balai Besar POM di Denpasar.
5. Deputi Direksi Wilayah XI BPJS Kesehatan (Bali dan Nusa Tenggara);
6. Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali Nusa Tenggara dan Papua (BANUSPA);
7. Perwakilan BP3MI Bali;
8. Direktur RSUD Kab. Tabanan;
9. Kepala UPTD BLK Tabanan.

Mitra Kerja Komisi IX dan Pendamping dari pusat:

1. Kementerian Kesehatan RI;
2. Kementerian Ketenagakerjaan RI;
3. BP2MI;
4. BPOM RI;
5. BKKBN RI;
6. Dewas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan; dan
7. Dewas dan Direksi Dewas BPJS Kesehatan.

II. GAMBARAN UMUM DAERAH

II.1 Gambaran Umum

Kabupaten Tabanan terletak di bagian selatan pulau Bali, berlokasi cukup strategis dengan jarak hanya lebih kurang 25 km dari ibu kota provinsi Bali, Denpasar. Perbatasan Kabupaten Tabanan adalah:

- Utara : Kabupaten Buleleng
- Selatan : Samudra Indonesia
- Barat : Kabupaten Jembrana
- Timur : Kabupaten Badung

Dalam data yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Tabanan, luas daratan Kabupaten Tabanan mencapai 839,33 km², atau 14,90% wilayah Bali, sehingga Kabupaten Tabanan termasuk kabupaten terbesar kedua di Provinsi Bali setelah Kabupaten Buleleng, dengan jumlah penduduk sebanyak 471,3 ribu jiwa, dan kepadatan penduduk mencapai 561 jiwa per km². Untuk wilayah administratif, Kabupaten Tabanan terdiri atas 10 kecamatan, yaitu Selemadeg,

Selemadeg Timur, Selemadeg Barat, Kerambitan, Tabanan, Kediri, Marga, Baturiti, Penebel, dan Pupuan.

Kecamatan <i>District</i>	Ibukota Kecamatan <i>Capital of District</i>	Luas <i>Total Area</i> (km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)
Selemadeg	Bajera	52,05
Selemadeg Timur	Megati	54,78
Selemadeg Barat	Antosari	120,15
Kerambitan	Kerambitan	42,39
Tabanan	Tabanan	51,4
Kediri	Kediri	53,6
Marga	Marga	44,79
Baturiti	Baturiti	99,17
Penebel	Penebel	141,98
Pupuan	Pupuan	179,02
Kabupaten Tabanan		839,33

II.2 Gambaran Umum Kesehatan Kabupaten Tabanan

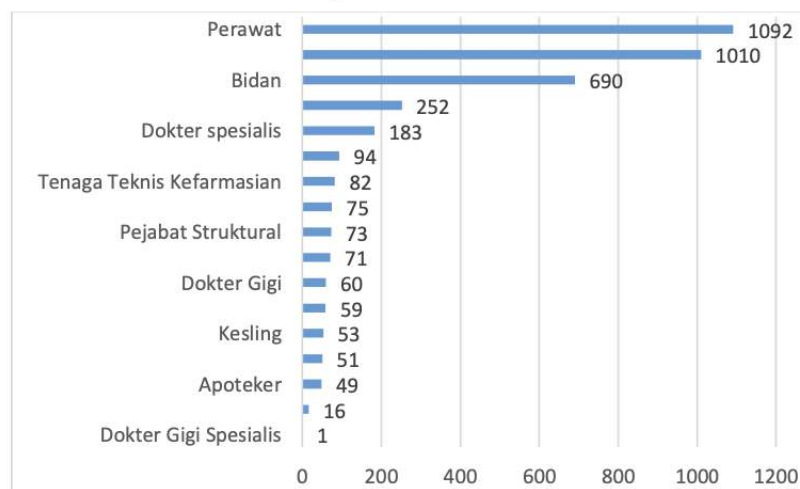
Berdasarkan profil kesehatan Kabupaten Tabanan tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, menyebutkan bahwa sarana pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah (puskesmas) telah menjangkau keseluruhan kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan, bahkan jika digabungkan dengan puskesmas pembantu, dan poskesdes sebagai jaringan pelayanannya dan UKBM, telah menjangkau seluruh desa yang ada.

Pada tahun 2022 jumlah Puskesmas di Kabupaten Tabanan sebanyak 20 unit, dengan rincian jumlah Puskesmas perawatan sebanyak 5 unit dan Puskesmas non rawat inap sebanyak 15 unit, dimana Puskesmas yang mampu melaksanakan PONEB (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar) sebanyak 5 Puskesmas yakni: Puskesmas Pupuan I, Puskesmas Selemadeg, Puskesmas Baturiti I, Puskesmas Penebel I, Puskesmas Selemadeg Barat. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap Puskesmas adalah rasio Puskesmas terhadap 30.000 penduduk sebesar 1,38. Pada tahun 2022 jumlah Puskesmas Perawatan di Kabupaten Tabanan adalah 5 unit atau 25% dari jumlah Puskesmas yang ada. Puskesmas di Kabupaten Tabanan yang merupakan Puskesmas Perawatan antara lain Puskesmas Pupuan I di Kecamatan Pupuan, Puskesmas Selemadeg di Kecamatan Selemadeg, Puskesmas Baturiti I di Kecamatan Baturiti, Puskesmas Penebel I di Kecamatan Penebel, dan Puskesmas Selemadeg Barat di Kecamatan Selemadeg Barat.

Pada tahun 2022 jumlah rumah sakit di Kabupaten Tabanan sebanyak 10 (sepuluh) unit. Rumah sakit yang dikelola pemerintah sebanyak 2 (dua) unit yaitu Rumah Sakit Umum Tabanan, dan UPT Rumah Sakit Nyitdah, sedangkan rumah sakit yang dikelola swasta sebanyak 8 (delapan) unit antara lain RS. Wisma Prasanthi, RS. Dharma Kerti, RS. Bhakti Rahayu, RS. Kasih Ibu, RS. Bali Holistic, RS Semara Ratih, RSIA Cahaya Bunda, dan RSIA Puri Bunda Tabanan. Dilihat dari jenisnya terdapat 8 (delapan) unit rumah sakit umum dan 2 (dua) unit rumah sakit khusus ibu dan anak.

Untuk SDM Kesehatan, berikut gambaran jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Klinik di Kabupaten Tabanan tahun 2022:

Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Puskesmas Rumah Sakit, dan Klinik di Kabupaten Tabanan Tahun 2022



Sumber : Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, Seksi Pelayanan Kesehatan

Primer, Tahun 2022

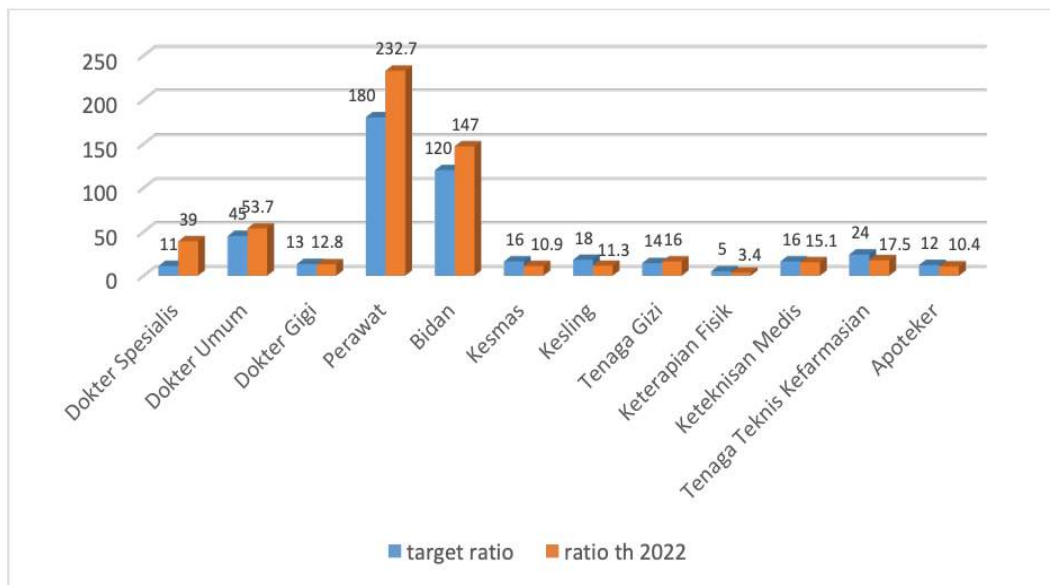
Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Tabanan tahun 2022 terdapat sebanyak 3.911 tenaga kesehatan yang bekerja pada Puskesmas, RS, dan Klinik, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dokter umum : 252 orang
2. Dokter Spesialis : 183 orang
3. Dokter Gigi : 60 orang
4. Perawat : 1.092 orang
5. Bidan : 690 orang
6. Apoteker : 49 orang
7. Tenaga Kefarmasian : 82 orang
8. Ahli Lab. Medik : 94 orang
9. Teknik Biomedika : 59 orang
10. Tenaga kesling : 53 orang
11. Tenaga Kesmas : 51 orang
12. Tenaga keteknisan medis : 71 orang

13. Nutritionist/tenaga gizi : 75 orang

Jumlah dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, dan tenaga gizi yang ada di Kabupaten Tabanan telah memenuhi ratio yang ditargetkan. Sementara untuk tenaga dokter gigi, kesehatan masyarakat, sanitarian, keterampilan fisik, keteknisian medis, tenaga teknis kefarmasian, dan apoteker masih dibawah standar target kebutuhan SDMK Tahun 2019 yang ditetapkan menurut Kepmenko Bidang Kesra No.54 Tahun 2013.

Perbandingan Standar Ratio dengan Ratio Tenaga Kesehatan Yang Ada di Kabupaten Tabanan Tahun 2022



II. 3 Gambaran Umum Ketenagakerjaan Kabupaten Tabanan

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2022 di Kabupaten Tabanan, jumlah penduduk usia kerja adalah sebanyak 373.825 orang, dengan 287.569 orang merupakan angkatan kerja, dengan partisipasi angkatan kerja sebesar 75,74%. Penduduk bekerja didominasi kelompok usia produktif, yaitu sebanyak 53,86% berusia 25 hingga 49 tahun. Mayoritas berpendidikan SMA/SMK sederajat sebanyak 42,35%.

Selama tahun 2020-2023, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tidak mengalami penurunan maupun peningkatan berarti, masih berkisar 74-76 persen, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Tabanan Tahun 2020 - 2022

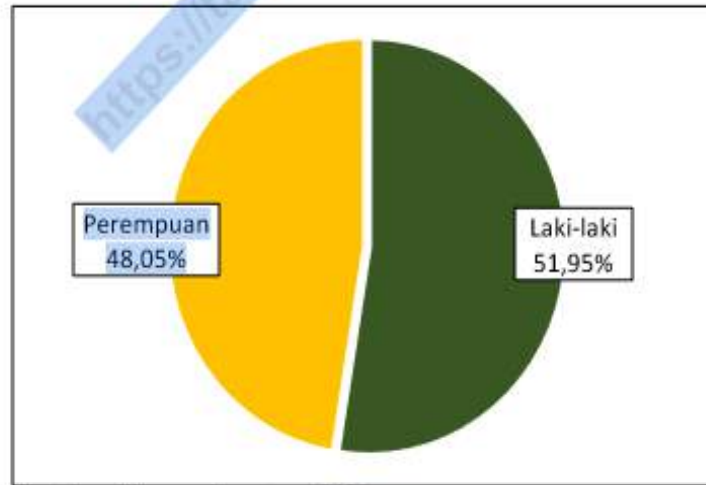
Tahun	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
2020	81,26	69,84	75,47
2021	81,43	68,72	74,98
2022	83,15	70,89	76,93

Sumber: Sakernas Agustus 2020-2022

Peningkatan penduduk usia kerja di Kabupaten Tabanan selama tiga tahun terakhir tidak diimbangi dengan peningkatan TPAK. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1, TPAK Kabupaten Tabanan tahun 2021 sebesar 74,98 persen, menurun jika dibandingkan dengan TPAK tahun 2020 yang sebesar 75,47 persen. Pada tahun 2022, TPAK meningkat menjadi 76,93 persen yang artinya dari 100 orang penduduk berusia 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja), sebanyak 76 hingga 77 orang siap untuk memproduksi barang dan jasa pada tahun tersebut.

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2022, sebanyak 276.569 penduduk Kabupaten Tabanan termasuk penduduk yang bekerja. Dari angka tersebut, rasio EPR pada tahun 2022 sebesar 73,98 persen yang artinya pada tahun tersebut sebagian besar penduduk Tabanan masuk ke dalam kelompok penduduk yang bekerja. Dalam tiga tahun terakhir, rasio EPR tahun 2022 merupakan yang tertinggi, yaitu sebesar 73,98 persen. Sejalan dengan kondisi TPAK Kabupaten Tabanan yakni TPAK laki-laki lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan, penduduk usia kerja yang bekerja di Kabupaten Tabanan juga didominasi oleh penduduk laki-laki.

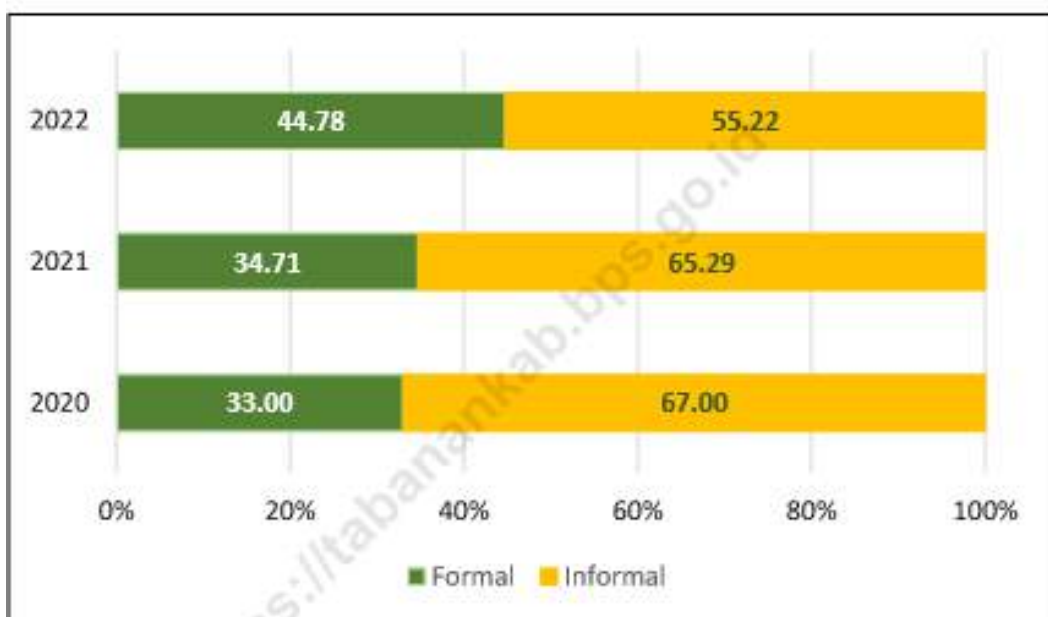
Gambar 3.5
 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin di
 Kabupaten Tabanan Tahun 2022



Sumber: Sakernas Agustus 2022

Dalam tiga tahun terakhir, penduduk di Kabupaten Tabanan yang berstatus sebagai pekerja formal semakin meningkat. Pekerja informal di Kabupaten Tabanan didominasi pekerja perempuan dengan persentase 52,17 persen pada tahun 2022. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 51,83 persen. Sebaliknya, pekerja laki-laki pada sektor informal justru mengalami penurunan dari 48,17 persen menjadi 47,83 persen di tahun 2022.

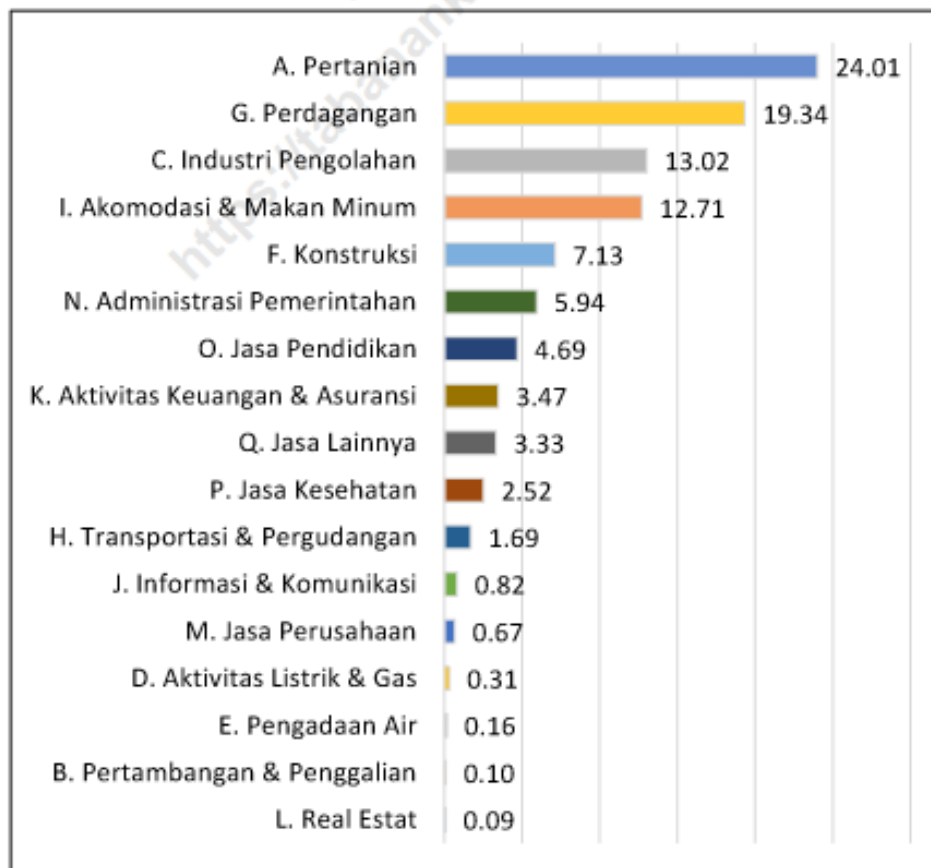
Gambar 3.7
 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan
 di Kabupaten Tabanan Tahun 2020-2022



Selama tiga tahun terakhir, lebih dari 70 persen pekerja keluarga/tidak dibayar berjenis kelamin perempuan. Persentase ini hampir tiga kali lipat dari jumlah pekerja keluarga/tidak dibayar berjenis kelamin laki-laki.

Penduduk Tabanan paling banyak bekerja di bidang kegiatan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Setelah itu, bekerja di perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Terakhir, di bidang kegiatan industri pengolahan menyerap tenaga kerja di Kabupaten Tabanan.

Gambar 3.10
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Tabanan Tahun 2022



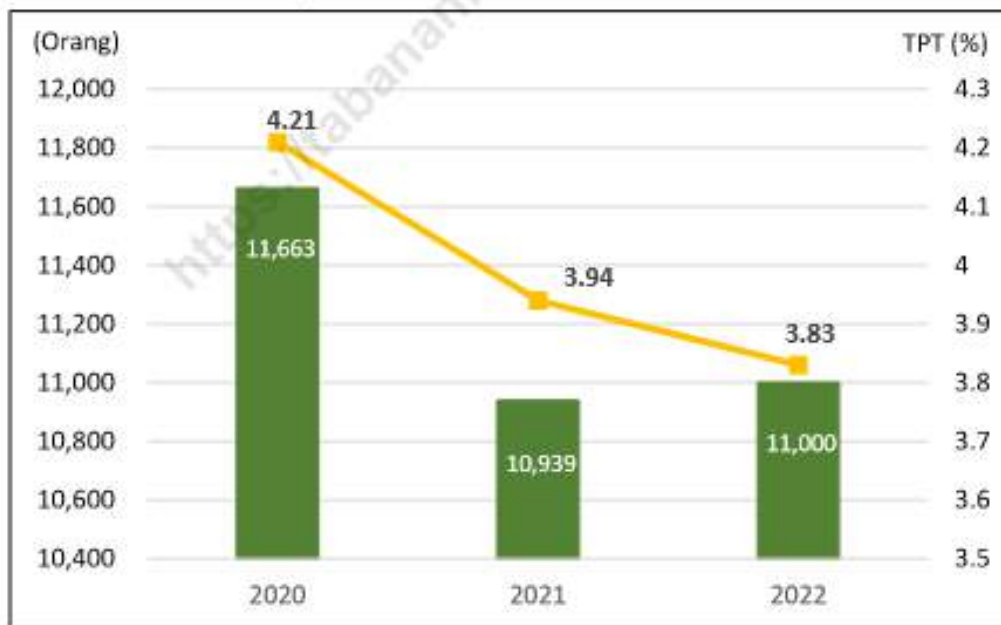
Sumber: Sakernas Agustus 2022

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, pada tahun 2022 masih banyak penduduk bekerja di Kabupaten Tabanan yang merupakan penduduk berpendidikan rendah yaitu sebesar 37,26 persen yang meliputi penduduk lulusan SMP/ sederajat, lulusan SD/ sederajat, dan tidak/ belum tamat SD/ sederajat. Angka ini relatif tinggi karena penduduk berpendidikan rendah cenderung bekerja pada jenis pekerjaan seadanya. Diikuti dengan penduduk bekerja yang merupakan lulusan SMA Umum sebesar 26 persen dan lulusan SMA Kejuruan sebesar 16,35 persen.

Jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Tabanan pada tahun 2020 sebanyak 11.663 orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,21

persen. Pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020 menyebabkan banyak penduduk kehilangan pekerjaannya sehingga TPT di Kabupaten Tabanan meningkat drastis dibandingkan tahun 2019. Di tahun 2021, pengangguran di Kabupaten Tabanan turun ke angka 3,94 persen (10.939 orang). Hasil Sakernas Agustus 2022 juga menunjukkan penurunan TPT Kabupaten Tabanan menjadi 3,83 persen (11.000 orang). Penurunan ini terjadi karena situasi pandemi COVID-19 yang sudah mulai terkendali, sehingga banyak penduduk yang kembali bekerja seperti sedia kala meskipun belum sepenuhnya. Pengangguran didominasi laki-laki yaitu sebesar 85,48%. Sedangkan berdasarkan pendidikan TPT tertinggi yaitu lulusan SMP, SD dan tidak atau belum tamat SD.

Gambar 4.1
Jumlah Pengangguran Terbuka dan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Tabanan Tahun 2020- 2022



Sumber: Sakernas Agustus 2020-2022

III. HASIL KUNJUNGAN

A. BIDANG KESEHATAN

1. Tahun 2023 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kabupaten Tabanan sebesar Rp.19.145.728.800,- dengan rincian adalah untuk pengendalian penyakit sebesar Rp.220.642.800,- dan penguatan sistem kesehatan sebesar Rp.18.925.086.000,-. Untuk DAK Non Fisik berjumlah Rp.24.180.624.000,-, untuk BOK Kabupaten sebesar Rp.6.227.369.000,- serta BOK Puskesmas sebesar Rp.17.953.255.000,-.

2. Sedangkan untuk DAK Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

RINCIAN DAK FISIK	Alokasi Dana	Lokasi			
		Dinas Kesehatan	RSUD Tabanan	RSUD Singasana	Puskesmas
1 Penguatan penurunan angka kematian ibu, bayi dan intervensi stunting	2.550.129.000	400.129.000	2.150.000.000		
2 Penguatan sistem kesehatan keluarga	6.053.214.000	3.053.214.000	1.500.000.000	1.500.000.000	
3 Berencana	-		-		
TOTAL	8.603.343.000	3.453.343.000	3.650.000.000	1.500.000.000	
RINCIAN DAK NON FISIK					
1 BOK Kabupaten	7.549.679.000	7.549.679.000			
2 BOK pengawas obat dan makanan	417.601.000	417.601.000			
3 BOK puskesmas	14.653.459.000				14.653.459.000
TOTAL	22.620.739.000	7.967.280.000	-	-	14.653.459.000

3. Kabupaten Tabanan memprioritaskan pembangunan bidang kesehatan untuk penurunan stunting, Akreditasi Fasyankes (Puskesmas), pemenuhan kebutuhan SDM, Integrasi Layanan Primer (ILP), serta penurunan AKI dan AKB.
4. Masalah kesehatan prioritas tahun 2024 di Kabupaten Tabanan adalah melakukan transformasi kesehatan melalui Integrasi Layanan Primer yang mencakup penurunan stunting, penurunan AKI dan AKB, Akreditasi Fasyankes, dan pemenuhan kebutuhan SDM.
5. Selain permasalahan pada poin diatas, ada beberapa hal lagi yang menjadi prioritas Kabupaten Tabanan, yaitu:
 - belum memadainya sarana dan prasarana kesehatan, bahkan mengalami banyak kerusakan di semua fasilitas kesehatan;
 - belum bisa sepenuhnya mengendalikan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - masih terjadi AKI dan AKB; dan
 - masih terjadi permasalahan gizi di Kabupaten Tabanan.
6. Untuk permasalahan SDM di Kabupaten Tabanan selain sebaran yang tidak merata, belum terpenuhinya kebutuhan SDM berdasarkan perhitungan analisis beban kerja (ABK). Berikut data SDM Kabupaten Tabanan saat ini:

Tabel III.29 Ratio Tenaga Kesehatan Terhadap Penduduk di Kabupaten Tabanan Tahun 2023

No	Jenis Tenaga	Kebutuhan Nakes Kab. Tabanan Tahun 2025	Jumlah Nakes Kab. Tabanan	Keterangan
1	Dokter Spesialis	54	202	Lebih
2	Dokter Umum	224	259	Lebih
3	Dokter Gigi	63	59	Kurang
4	Perawat	896	1136	Lebih
5	Bidan	582	675	Lebih
6	Perawat Gigi	94	57	Kurang
7	Apoteker	67	47	Kurang
8	Asisten Apoteker	134	96	Kurang
9	SKM	81	97	Lebih
10	Sanitarian	90	61	Kurang
11	Tenaga Gizi	81	78	Kurang
12	Keterampilan Fisik	27	16	Kurang
13	Keteknisian Medis	81	15	Kurang

Sumber : <https://sisdmk.kemkes.go.id/> tanggal 30 September 2023

untuk Puskesmas, masih terdapat beberapa yang belum memenuhi 9 jenis Tenaga Kesehatan berdasarkan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, yaitu untuk tenaga nutrisisionis, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan.

7. Selain kekurangan SDMK baik secara kualitas maupun kuantitas, pembiayaan bidang kesehatan yang masih kurang juga menjadi permasalahan mendasar yang harus dicarikan jalan keluarnya.
8. Untuk kependudukan, masih terjadi penyebaran penduduk yang tidak merata karena pusat pertumbuhan ekonomi terpusat di ibukota, yaitu Kota Tabanan.

9. Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOKB Tahun 2023 Kabupaten Tabanan:

ALOKASI DAN SERAPAN DANA DAK NON FISIK (BOKB TAHUN 2023)

NO	PROGRAM	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE (%)
1	Operasional Balai Penyuluhan KB	481.500.000,-	444.201.304,-	92,25
2	Operasional Pelayanan KB	1.363.972.000,-	407.544.774,-	29,88
3	Operasional Pergerakan di Kampung KB	164.000.000,-	133.800.000,-	81,58
4	Operasional Penurunan Stunting	2.892.800.000,-	2.846.048.000,-	98,38
5	Operasional Pembinaan Program Bangga Kencana	561.800.000,-	529.344.999,-	94,22
6	Dukungan Manajemen dan SIGA	124.200.000,-	83.321.797,-	67,08
	TOTAL	5.578.272.000,-	4.474.261.977,-	80,21

10. RSUD Tabanan masih mengalami kekurangan tenaga medis dan tenaga kesehatan sebanyak 27 orang, walaupun saat ini sudah mempunyai 76 orang tenaga medis, 367 orang paramedis keperawatan, dan 239 orang tenaga paramedis non keperawatan. Untuk tenaga honorer non-PNS adalah 24 orang tenaga medis, 199 orang paramedis keperawatan, dan 96 orang paramedis non keperawatan.

Selain jumlah tenaga kesehatan, kendala yang masih dihadapi oleh RSUD Tabanan adalah belum berjalannya registrasi online secara optimal, bangunan yang tergolong sudah lama menyebabkan situasi kurang nyaman.

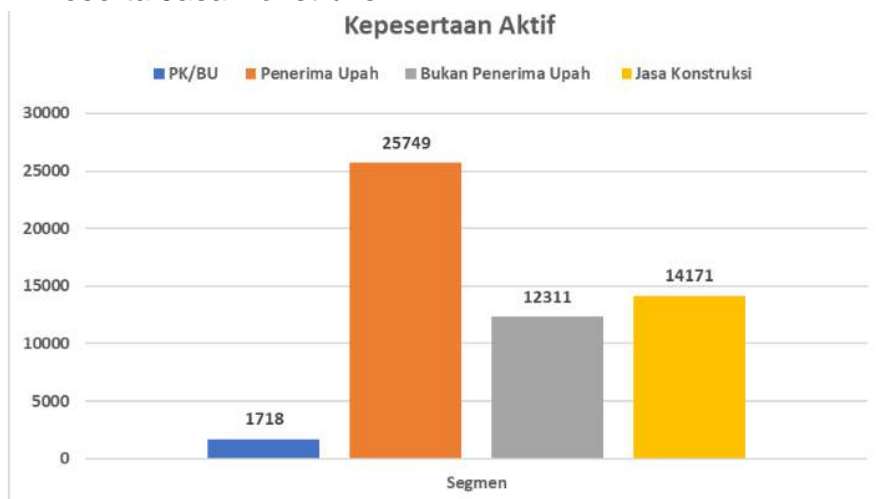
B. BIDANG KETENAGAKERJAAN

1. Terdapat dua Program prioritas ketenagakerjaan Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2024. *Pertama*, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan indikator keberhasilan program adalah persentase tenaga kerja kompeten dan produktif yang dihasilkan berbanding dengan jumlah pencari kerja terdaftar. *Kedua*, Program Penempatan Tenaga Kerja dengan indikator keberhasilan program adalah persentase tenaga kerja yang memasuki dunia kerja berbanding dengan jumlah pencari kerja.
2. Berikut struktur APBD untuk bidang tenaga kerja pada 2023-2024

NO	PROG/KEG/SUB KEG	2023 (Rp)	2024 (Rp)
	Urusan Tenaga Kerja	491.200.000,-	189.558.500,-
1	Program Pelatihan Kerja dan	416.200.000,-	144.003.000,-

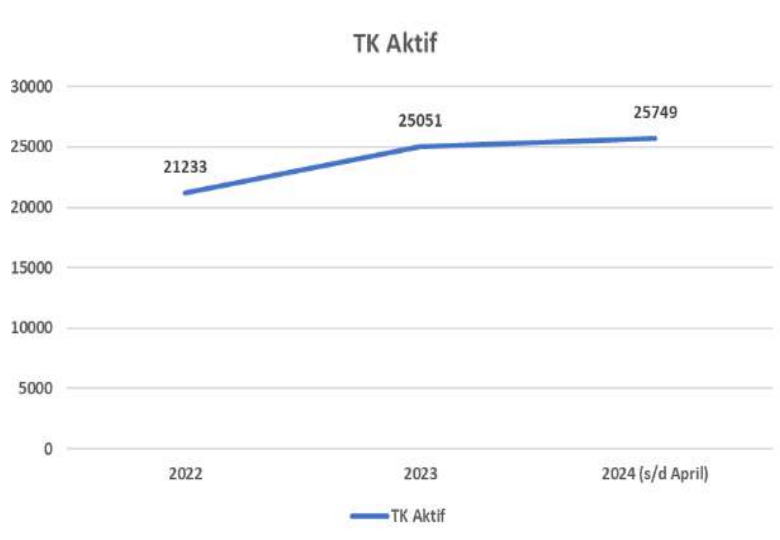
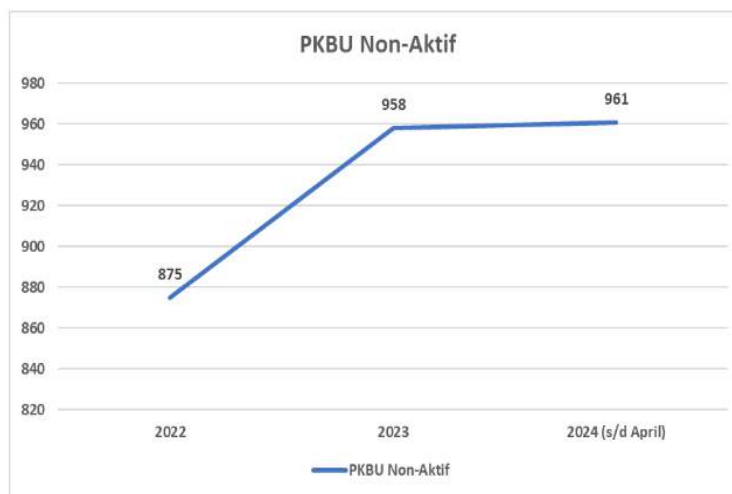
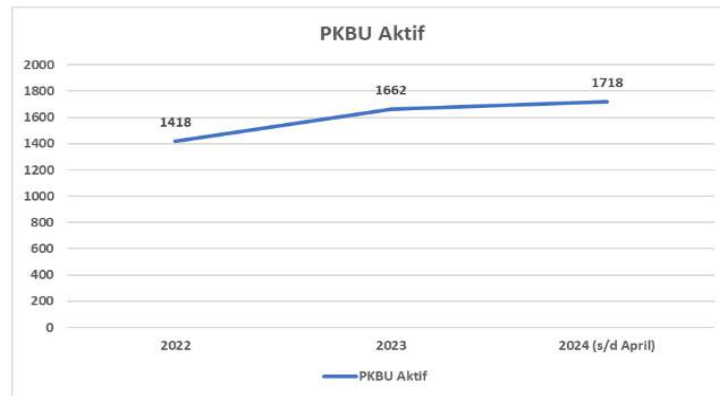
	Produktivitas Tenaga Kerja		
1.1	Kegiatan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi		
1.1.1	Sub Kegiatan Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	409.200.000,-	137.963.000,-
1.2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		
1.2.1	Sub Kegiatan Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	7.000.000,-	6.040.000,-
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	75.000.000,-	45.555.500,-
2.1	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Di Daerah Kabupaten/Kota		
2.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	50.000.000,-	24.555.500,-
2.2	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		
2.2.1	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	25.000.000,-	21.000.000,-

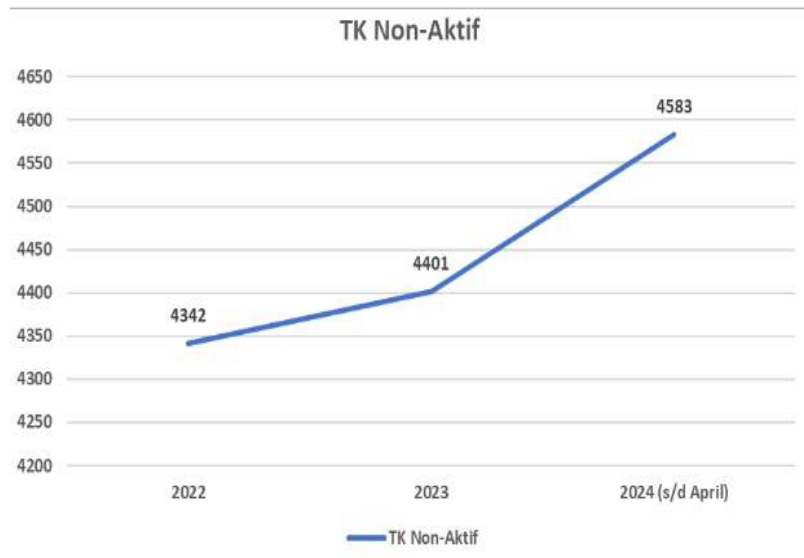
3. Dalam melaksanakan tugas, permasalahan yang dihadapi dinas tenaga kerja Tabanan adalah Kesulitan dalam manajemen pekerjaan dari sisi kuantitas. Hal ini terjadi karena perampingan struktur organisasi dengan cara penggabungan bidang pelatihan dengan bidang penempatan yang disertai dengan perampingan sumber daya manusia.
4. Permasalahan perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Tabanan Tahun 2023 ada 5 (lima) permasalahan. Empat masalah selesai dengan kesepakatan penyelesaian perjanjian Bersama, dan satu permasalahan perselisihan hubungan industrial dilimpahkan ke Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali karena lokasi Perusahaan lintas kabupaten. Sedangkan pada tahun 2024 sampai bulan April 2024 terjadi satu permasalahan perselisihan Hubungan Industrial, yang penyelesaiannya tidak tercapai kesepakatan sehingga dikeluarkan anjuran tertulis. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
5. Kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tabanan dengan *cut off* data per 30 April 2024 memiliki tenaga kerja aktif sejumlah 52.231. Adapun detail tenaga kerja aktif tersebut sebagai berikut:
 - Badan Usaha Aktif (PK/BU): 1.718
 - Peserta PU: 25.749
 - Peserta BPU: 12.311
 - Peserta Jasa Konstruksi: 14.171



Untuk kepesertaan Penerima Upah baik untuk badan usaha dan tenaga kerja di Kantor Cabang Tabanan terjadi kenaikan dari 2022 sampai april 2024.

Berikut grafik kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Tabanan sejak 2022 sampai 2024:





Peningkatan kepesertaan aktif di Tahun 2023 merupakan kontribusi dari kepesertaan perangkat desa se-Kabupaten Tabanan sejumlah 73 desa, dari total 133 desa yang ada. Serta dari badan usaha lainnya seperti Apotek, Notaris dan UMKM dan dari penambahan tenaga kerja badan usaha *existing* misal dari Yayasan Pinandita Sanggraha Nusantara. Kepesertaan aktif PKBU dan tenaga kerja di Tahun 2024 dengan data terakhir bulan April terjadi peningkatan melalui dari akusisi UMKM dan kepesertaan *existing*. Proyeksi kepesertaan aktif akan terus meningkat sampai akhir Tahun 2024. Implementasi dari Peraturan Bupati Tabanan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terus meningkat setiap tahunnya. Merupakan bentuk dukungan dari Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

6. Berdasarkan data SISKOP2MI, pada tahun 2023 dari total PMI terdata di Bali sebanyak 10.087 orang, PMI asal Kabupaten Tabanan sejumlah 923 orang PMI, yang terdiri dari 512 laki-laki, 411 perempuan, yang didominasi berpendidikan SMA/SMK sederajat, Untuk pekerjaan di sektor kapal pesiar dan hospitality dengan jabatan spa therapist, cooks, waiter dan terbanyak di negara Eropa seperti Negara Bulgaria, Cyprus, Rusia.

Beberapa hambatan yang dihadapi BP3MI dalam melaksanakan tugas perlindungan pada PMI adalah sebagai berikut:

- a. PMI masih belum menyadari pentingnya pendataan diri melalui BP2MI terkait bekerja ke luar negeri.
- b. Belum semua PMI yang kembali ke tanah air mendaftarkan diri mereka di Helpdesk Pekerja Migran Indonesia.

- c. Kurangnya sumber daya manusia dalam penempatan petugas jaga di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan untuk melakukan sidak terhadap pihak yang ditengarai melakukan penempatan non prosedural.
 - d. Banyaknya lowongan kerja non prosedural ke luar negeri di media sosial.
 - e. Belum maksimalnya sinergi dengan pemerintah daerah dalam sosialisasi perihal penempatan dan perlindungan PMI.
 - f. Belum pahamnya masyarakat terkait bekerja aman ke luar negeri secara prosedural.
7. Bangunan UPTD BLK Tabanan sudah tidak layak digunakan. Sarana dan prasarana tidak memadai. Sekira dua ruangan ambruk. Beberapa ruang yang masih bias digunakan juga sangat miris kondisinya. Misalnya, suhu dalam ruangan sangat panas dan tidak ada AC. Dinding tembok mengelupas catnya. Atap jebol. Tidak tersedia alat-alat pelatihan.

IV. REKOMENDASI

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk membantu kebutuhan RSUD Tabanan khususnya SDM Kesehatan dan alat kesehatan sesuai aturan yang berlaku agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI melakukan upaya percepatan dalam pemenuhan ketersediaan dokter spesialis untuk memenuhi kekurangan dokter spesialis terutama di Rumah Sakit Umum Daerah.
3. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan RI untuk menindak tegas sesuai kewenangan yang dimiliki apabila masih terdapat rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan masih melakukan praktik memulangkan pasien BPJS ketika kondisi pasien masih butuh perawatan dan belum layak untuk dipulangkan.
4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperbaiki sarana dan prasarana UPTD BLK Tabanan. Segera koordinasi terkait transformasi BLK, agar masyarakat mendapatkan tempat pelatihan kerja yang memadai.
5. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperbanyak program pelatihan kerja dengan pemberian keahlian baru atau peningkatkan keahlian yang sudah ada dalam upaya memperluas lapangan kerja maupun pemenuhan kebutuhan tenaga kerja.

V. PENUTUP

Demikian laporan kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI ke Pemerintah Kabupaten Tabanan ini kami buat. Atas perhatian Pemerintah Kabupaten dan dukungan dari semua pihak, kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, Mei 2024

**TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI
KE KABUPATEN TABANAN**

KETUA TIM,

ttd.

Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A.

A-35